

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA
BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Anggaran Fiktif Jadi Modus Korupsi Dana Desa
Entitas / Cakupan	: Kota Banjar
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat / Hal.5
Edisi	: Senin, 3 September 2018

Anggaran Fiktif,
Jadi Modus Korupsi Dana Desa

BANJAR, (PR).-
Anggaran fiktif dan duplikasi anggaran sering menjadi modus yang dilakukan oknum pejabat desa untuk melakukan korupsi dana desa. Kepolisian Resor (Polres) Kota Banjar sudah mengantongi nama yang bakal menjadi tersangka korupsi dana Desa Balokang, Kecamatan/Kota Banjar. Kasus korupsi yang bergulir sejak tahun 2015 yang berkaitan dengan pemanfaatan dana desa.
"Kami sudah mengantongi tersangkanya. Hasil penyelidikan mengungkap kerugian negara mencapai Rp 370 juta," tutur Kapolres Kota Banjar Ajun Komisaris Besar Matrius, Minggu (2/9/2018).
Dua nama dimaksud berinisial OH yang tidak lain (sudah mengundurkan

diri dari posisinya sebagai Kepala Desa Balokang) dan Y. Matrius menambahkan sebelum menetapkan, hingga saat ini masih menunggu audit dari Inspektorat Kota Banjar.
"Modusnya dengan membuat penganggaran fiktif dan duplikasi anggaran. Begitu hasil audit keluar, selanjutnya penetapan tersangka," ujarnya.

”
Kami sudah mengantongi tersangkanya.
Hasil penyelidikan mengungkap kerugian negara mencapai
Rp 370 juta.
”

Kasus bergulir
Dia menambahkan, tidak menutup

kemungkinan jumlah tersangkanya bertambah. Alasannya, sampai saat ini masih terus mengembangkan kasus yang dimulai 2015. Namun demikian, Matrius menegaskan mengedepankan azas praduga tidak bersalah.
"Karena masih bergulir, tidak menutup kemungkinan jumlah tersangkanya bertambah. Menunggu hasil penyidikan nanti," tutur Matrius.

Informasi yang dihimpun, OH mengajukan pengunduran diri, dari jabatannya sebagai kepala Desa Balokang yang bakal berakhir tahun 2019. Pengunduran diri tersebut diduga berkaitan dengan kasus yang sedang dialaminya.
Matrius menambahkan, untuk mengantisipasi penyimpangan pemakaian dana desa, polisi menerjunkan 16 Bhabinkamtibmas ikut mengawasi anggaran tersebut. Langkah itu merupakan tindak lanjut adanya nota kesepahaman antara Polri, Kemendes, dan Kemendagri.
"Sebelum diterjunkan ke desa, mereka juga sudah menerima pembekalan sehingga arahan yang disampaikan sejalan dengan aturan menyangkut pemanfaatan dana desa. Intinya adalah mengantisipasi kemungkinan penyimpangan dana desa," tutur Matrius.
(Nurhandoko Wiyoso)***